Kinerja Kelompok Usaha Bersama (Kube) dalam Pengentasan Kemiskinan

Business Group Program Performance on Poverty Elevation

Sri Yuni Murti Widayanti dan A. Nururrochman Hidayatulloh

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu, Yogyakarta, Telp (0274) 377265, Fax (0274) 373530. E-mail: <yunimurti@rocketmail.com> dan <anhidayatullah79@gmail.com>. Diterima 5 Desember 2014, direvisi 27 Maret 2015, disetujui 5 Mei 2015.

Abstract

This research means to reveal business group (Kube) seen from social, economic, and institutional aspects, including its benefit to the members of the poor community, its handicap and supporting factors. This research is qualitative-descriptive approach. Data resources are from eight business groups, the informants are rural local officials from related institution, social guides, social volouteers, informal leaders, women caders, cooporational partners, and community members form Kupang Municipality and Regency. Data are gathered through interview, observation, and documentary analysis. Data are analysed through interpretive-descriptive technik. The result shows that kubes are in developing category. If they seen form social performance aspect, five kubes have good score, three kubes have sufficient score, seen from social aspect there are five kubes have good score, three kubes have sufficient score. If they seen seen from institutional aspect, one kube has good score, and three kubes have sufficient score, and four Kubes have poor score. kube as a mean of empowerment and poverty elevation should improve its performance so that kube as a business group can be achieved. Kube can be economic institution that based on the spirit of togetherness and solidarity, national loyalty, that it can improve lives and social welfare qualities.

Keywords: Performance; Business Group; Poverty Elevation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkap implementasi kinerja Kube dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Kube, serta manfaat Kube bagi anggota dan masyarakat yang dijadikan indikator keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data informan terkait, meliputi aparat pemerintah desa, pendamping, relawan sosial, tokoh masyarakat, kader perempuan, dan mitra usaha (dunia usaha yang terlibat kegiatan Kube). Rincian informan meliputi, pejabat instansi terkait, pendamping kube, relawan, tokoh informal, mitra usaha, warga masyarakat sekitar kube dari Kabupaten dan Kota Kupang. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data yang telah terkumpul di analisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan delapan Kube dalam kategori berkembang. Berdasarkan pada analisis kinerja kube dilihat dari aspek social, ada lima kube bernilai baik dan tiga kube bernilai kurang, dilihat dari aspek ekonomi terdapat satu kube bernilai baik, tiga kube bernilai cukup, dan empat kube bernilai kurang. Dilihat dari aspek kelembagaan, ada satu kube yang bernilai baik dan tiga kube bernilai cukup serta empat Kube bernilai kurang. Kube sebagai wadah pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan perlu meningkatkan kinerjanya agar keberhasilan Kube menjadi usaha ekonomi kelompok dapat terwujud. Kube dapat menjadi potensi ekonomi berbasis kelompok yang mengedepankan semangat kebersamaan berlandaskan kesetiakawanan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Kinerja; Kube; Pengentasan Kemiskinan

A. Pendahuluan

Kemiskinan dalam konsep, kesejahteraan sosial, dimaknai sebagai masalah sosial yang

disandang oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat yang menyebabkan mereka mengalami keterbatasan tingkat kesejahteraan

sosialnya. Kesejahteraan sosial yang dimaksud menurut UU No 11 tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemiskinan merupakan persoalan yang mengandung banyak dimensi yang menuntut pemecahan secara integral.Seperti yang dikemukakan Jamasy (dalam Heru Nugroho, 2000) bahwa kemiskinan telah melibatkan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Tidaklah mengherankan apabila kesulitan akan timbul ketika fenomena kemiskinan diobjektifkan (dikuantifikasi) dalam bentuk angka-angka, seperti halnya dalam pengukuran dan penentuan garis batas kemiskinan yang hingga kini masih menjadi perdebatan.

Booth dan Mc Cawley (dalam Supriyatna Tjahya, 1997:82), mengemukakan bahwa suatu keadaan dikatakan miskin apabila ditandai oleh kekurangan atau ketidakmampuan memenuhi tingkat kebutuhan manusia. Kemiskinan tersebut meliputi kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan. Kemiskinan dilihat dari aspek sekunder berupa miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah. Heru Nugroho (2000) menambahkan, bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga politik dan budaya.

Faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan strutural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan sumber daya ekonomi (Suyanto, 1995). Kemiskinan kultural bukan bawaan melainkan akibat dari ketidakmampuan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan. Kemiskinan sumber daya ekonomi lebih melihat pada akar kemiskinan yang terletak pada ketidakmampuan sumber daya ekonomi seperti tanah, modal, pendidikan dan keterampilan, karena pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diiringi dengan sumber

daya ekonomi yang tersedia. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang dibuat oleh manusia yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik. Disebut kemiskinan strukural karena yang membuat sebagian masyarakat miskin adalah perseorangan melainkan struktur ekonomi dan politik yang tidak hanya bersifat eksplorasi terhadap pihak yang kurang memiliki sumberdaya,tetapi juga hanya berpihak pada orang—orang yang memiliki akses ekonomi dan politik.

Kemiskinan didefinisikan kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Masalah kemiskinan merupakan masalah multi dimensional yang sangat mendasar dan krusial karena menyangkut kehidupan dan penghidupan banyak penduduk di negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam berita resmi statistik nomor 06/01Th.XVII, tanggal 2 Januari 2014 menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2013 sebanyak 28,55 Juta Orang dengan persentase nasional sebanyak 11,47 persen bila dibandingkan dengan dengan penduduk pada bulan Maret 2013 yang sebanyak 28,07 Juta orang atau mengalami peningkatan sebesar 0,48 juta orang atau sekitar 11,37 persen. Hal tersebut menandai kenaikan angka kemiskinan masih tetap menghantui kondisi Indonesia. Sebagai program prioritas penanggulangan kemiskinan terus menerus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Beberapa program yang pernah digulirkan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan diantaranya adalah program Prokesra, Program Inpres Desa Tertinggal, Program P2KP untuk masyarakat perkotaan, Program PPK untuk masyarakat pedesaan, Program Kredit Mikro, Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Daerah, Pengembangan Prasarana Perdesaan, Program Beras Miskindan BLSM untuk Keluarga Miskin.

Undang-Undang RI No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ditindaklanjuti

Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan UU RI No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan. Kementerian Sosial sebagai instansi pemerintah yang menjalankan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mencangkan Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (Kube) dalam rangka Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK) (Kementerian Sosial, 2011).

Kelompok Usaha Bersama (Kube) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial melalui proses kegiatan Prokesos untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial (Departemen Sosial RI, 1997). Kube sebagai pendekatan program penanggulangan kemiskinan dilandasi suatu pertimbangan atas kenyataan adanya keterbatasan yang melekat pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan keluarga miskin, seperti rendahnya sumber daya manusia, kurangnya modal usaha dan keterbatasan kemampuan dalam menjalin jaringan pemasaran. Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (Kube) merupakan pendekatan yang terintegrasi dari 15 program penanganan fakir miskin.Kegiatan kelompok diharapkan dapat meningkatkan kemampuan anggota (PMKS keluarga miskin) dalam berwirausaha dan berinteraksi sosial dengan sesama anggota ataupun masyarakat, sehingga pada gilirannya mereka dapat meningkatkan kualitas taraf hidup, mengembalikan dan meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Jalinan kerjasama dalam Kube diharapkan timbul efek lain, yaitu kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Cara tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam Proses Produksi yang dilakukan oleh para anggota Kube. Dengan demikian, bukan hanya anggota Kube yang meningkat penghasilannya, tapi masyarakat sekitarnyapun

merasakan manfaat dengan keberadaan kube (Departemen Sosial RI, 2003)

Arah yang ingin dicapai dari Kube adalah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan melalui upaya peningkatan kemampuan berusaha pada anggota Kube secara bersama dalam kelompok, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha dan peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial di antara para anggota Kube dengan masyarakat sekitar. Secara umum Kube dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial untuk penanggulangan kemiskinan.

Kementerian Sosial RI, Sejak tahun 2003 memiliki kebijakan untuk mengintegrasikan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Keluarga Miskin melalui pendekatan terpadu Kube dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Beberapa program kegiatan Kube yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial diprioritaskan pada: Pertama, Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) bagi fakir miskin. Kedua, Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Kube Sejahtera yang didirikan di setiap desa miskin atau terpencil untuk memfasilitasi modal usaha bagi Kube fakir miskin.

Berbagai upaya di atas diharapkan dapat: Pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga miskin. Kedua, mewujudkan kemandirian usaha ekonomi keluarga fakir miskin. Ketiga, meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem jaminan sosial. Keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan. Kelima, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah kemiskinan. Keenam, meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dapat dilakukan dengan strategi pemberdayaan fakir miskin dalam arti memampukan fakir miskin baik dalam konteks individu maupun kelompok, melalui pemberian bimbingan sosial dan keterampilan teknis

ekonomi Produktif, pengelolaan manajemen usaha ekonomi produktif, manajemen pemasaran usaha dan pengembangan jaringan usaha, kewirausahaan, keswadayaan, pengembangan pribadi dalam usaha, peranan keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial (UKS) serta keterampilan IKS, asesmen kebutuhan, masalah keluarga dan lingkungan

Sejak Kube dicanangkan sebagai pendekatan dalam penanganan kemiskinan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Sosial RI selama kurang lebih sebelas tahun (sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2014), maka perlu dikaji, apakah pendekatan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan sosial mereka? Penelitian dilakukan di Kabupaten dan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengingat di lokasi tersebut merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tergolong tinggi dan terdapat program penanggulangan kemiskinan melalui Kube. Adapun permasalahan penelitian dirumuskan Bagaimana gambaran pelaksanaan kinerja Kube ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, kelembagaan? Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Kube? Apakah manfaat Kube bagi anggota dan masyarakat? Seiring dengan permasalahan yang diungkapkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah diketahui gambaran pelaksanaan Kube ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, teridentifikasi faktorfaktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Kube.

Sejalan dengan permasalahan yang akan diungkap di atas maka tujuan penelitian ini adalah diketahui gambaran kinerja Kube ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kinerja Kube, diketahui manfaat Kube bagi anggota dan masyarakat. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: sebagai salah satu referensi dan bahan pertimbangan kepada Kementerian Sosial RI, khususnya Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan selaku pembuat kebijakan terkait dengan upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Kube, dan sebagai upaya pengembangan teoritik dan pengembangan pengetahuan praktek di bidang pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Secara eksplisit tujuan pembentukan Kube adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan sosial keluarga binaan sosial (KBS) melalui UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan UKS (Usaha Kesejahteraan Sosial). Kedua, meningkatkan prinsip berkoperasi dalam meningkatkan UEP kelompok; Ketiga, mampu menyisihkan hasil usahanya untuk ditabung guna menghadapi keperluan mendadak atau sebagai tambahan modal; Keempat, terbinanya kegiatan anggota keluarga; Kelima, mengingkatkan kesejahteraan sosial kelompok binaan sosial (KBS) dan terbinanya usaha Jaminan Kesejahteraan Sosial (JKS) yang berbasis masyarakat

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunya kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya. Mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan (UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin) maka yang menjadi sasaran program Kube adalah keluarga fakir miskin (Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin hal 17 Tahun 2010) dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, kepala keluarga fakir miskin yang mempunyai pendapatan dibawah garis kemiskinan (tingkat pengeluaran sama dengan 480 kg setara beras untuk perkotaan dan 320 kg untuk perdesaan); Kedua, warga masyarakat yang berdomisili tetap; Ketiga, menyatakan kesediaan bergabung dalam kelompok; Keempat, memiliki potensi dan keterampilan di bidang usaha ekonomi tertentu.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mengidentifikasi dan menggambarkan tentang pelaksanaan kinerja kube ditinjau dari aspek sosial,

ekonomi dan kelembagaan sebagai implementasi program penanganan kemiskinan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Kube dalam pengentasan kemiskinan, serta manfaat Kube bagi anggota dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan teknik deskriptif dalam bentuk siklus, simultan, alami dan wajar mulai dari data *reduction*, *display*, *conclusion drawing*, *verification* (Mill dan Huberman dikutip Sunit Agus Tri Cahyono, 2010: 39). Analis data dilakukan sejak dalam proses pengumpulan data sampai setelah pengumpulan data di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengambil Kabupaten dan Kota Kupang sebagai lokasi penelitian karena menurut data dari BPS jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut relatif banyak yakni 21,03 persen pada maret 2011. Dengan melihat permasalahan tersebut, Kementerian Sosial RI memberdayakan penduduk miskin melalui Kube. Pelaksanaan pemberdayaan program kemiskinan melalui kube disesuaikan dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pengumpulan data mengggunakan teknik wawancara berpanduan, observasi, dan telaah dokumen. Secara teknis diambil delapan Kube fakir miskin yang berdiri antara tahun 2005-2009 sebagai sasaran analisis. responden penelitian adalah dua orang anggota dan empat orang pengurus di setiap Kube, merupakan sumber data primer yang dianggap memiliki kompetensi untuk menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan kegiatan dan manfaat kube. Informasi yang diberikan responden penelitian menggambarkan kinerja kube dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga miskin beserta faktor pendukung dan penghambat yang ditemui dalam pengelolaan kube. Untuk memperoleh data yang lebih akurat penelitian berupaya menggali informasi dari berbagai informan yang dipilih secara purposive. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu sejumlah orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan kube. Informan yang dimaksud meliputi

aparat pemerintah desa, pejabat instansi terkait, pendamping, relawan sosial, tokoh masyarakat, kader perempuan, dan mitra usaha (dunia usaha yang terlibat kegiatan kube). Rincian informan meliputi aparat kelurahan dua orang, pejabat instansi terkait sebanyak dua orang, pendamping kube lima orang, relawan sebanyak dua orang, tokoh informal sebanyak tiga orang, mitra usaha sebanyak dua orang, warga masyarakat sekitar Kube sebanyak delapan orang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis kinerja Kube akan dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan dan serta faktor-faktor pendukung dan menghambat pelaksanaan kube. Teknik analisis data kualitatif yang menggambarkan pelaksanaan program Kube beserta faktor-faktor yang mempengaruhi (data yang bersifat kualitatif dari informan penelitian) akan dianalisis secara deskriptif interpretatif.

C. Hasil dan Pembahasan: Kinerja Kube dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

1. Deskripsi Wilayah Penelitian Kabupaten dan Kota Kupang

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di selatan khatulistiwa pada posisi 8°–12° Lintang Selatan dan 118°–125° Bujur Timur. Adapun batas wilayah Provinsi NTT di sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah timur berbatasan dengan Negara Timor Leste dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur, berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010 (BPS, 2010) 4.679.316 jiwa, dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki tercatat 2.323.534 jiwa, sedang 2.355.782 jiwa lainnya berjenis kelamin perempuan. Penyebaran penduduk terbayak di NTT masih bertumpu di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebesar 9,41 persen dari total penduduk NTT, menyusul Kabupaten Belu sebesar 7,53 persen, dan Kota Kupang sebesar 7,17 persen. Kabupaten yang

memiliki jumlah penduduk paling sedikit atau terendah adalah Sumba Tengah, Sabu Raijua, dan Sumba Barat masing-masing berjumlah 62.510 orang, 73.000 orang, dan 111.023 orang. Kabupaten Sikka di Pulau Flores merupakan kabupaten yang paling banyak penduduknya untuk wilayah di luar Pulau Timor, yakni sebanyak 300.301 orang.

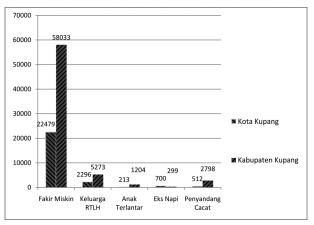
Persentase penduduk miskin Provinsi NTT pada Maret 2011 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Maret 2010 dari sebesar 23,03 persen menjadi 21,23 persen pada Maret 2011. Keadaan penduduk miskin Provinsi NTT pada periode 2010-2011 juga mengalami penurunan sebesar 1,2 ribu. Penurunan penduduk miskin pada periode dua tahun ini yaitu Maret 2010 sebesar 1.014,1 ribu (23,31 persen) menjadi 1.012,9 ribu (21,23 persen) pada Maret 2011. Pada periode 2007-2011 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 1.163,6 ribu (27,51 persen) pada tahun 2007, menjadi 1.098,3 ribu (25,65 persen) tahun 2008, 1.013,2 ribu (23,31 persen) tahun 2009, 1.014,1 ribu (23,03 persen) pada tahun 2010 dan menjadi 1.012,9 ribu (21,23 persen) pada tahun 2011. Pada periode 2012–2013 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 20, 41 persen (1.009.15 ribu) pada tahun 2012 menjadi 20, 24 persen menjadi 1.000,29 ribu di tahun 2013.

Kabupaten Kupang terletak antara 121° 30' BT - 124° 11' BT dan 9° 19' LS-10° 57' LS. Batas-batas kabupaten ini adalah sebagai berikut. Utara dan Barat dengan laut Sawu, Selatan dengan Samudera Hindia dan Timur dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Negara Timor Leste. Kabupaten Kupang mencakup 27 pulau, di antaranya terdapat delapan pulau yang belum memiliki nama. Hanya lima pulau yaitu Pulau Timor, Sabu, Raijua, Semau, dan Kera yang telah dihuni. Permukaan tanah di wilayah Kabupaten Kupang umumnya berbukit-bukit, bergununggunung dan sebagian terdiri dari dataran rendah dengan tingkat kemiringan rata-rata mencapai 45°. Sedangkan ketinggian Kabupaten Kupang permukaan laut adalah antara 0-500 meter. Kota Kupang secara geografis terletak di antara 10°

36′ 14" - 10° 39′ 58" Lintang Selatan (LS) dan 123° 32′ 23" - 123° 37′ 01" Bujur Timur (BT).

Kondisi geografis 180, 27 km² atau 18 027 Ha. Daerah tertinggi di atas permukaan laut di bagian selatan berkisar antara 100–350 meter. Daerah terendah di atas permukaan laut di bagian utara antara 0-50 meter dan tingkat kemiringannya 15 persen. Jumlah penduduk Kota Kupang pada tahun 2012 sebanyak 291.794 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 147.872 jiwa dan perempuan sebanyak 143.922 jiwa. Dalam kaitannya dengan persoalan sosial yang ada di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang ada beberapa hal yang menonjol terkait dengan permasalahan sosial diantaranya adalah sebagai berikut.

Grafik 1 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial



Sumber: BPS Provinsi NTT Tahun 2012

Berdasarkan data PMKS yang paling menonjol adalah fakir miskin diikuti keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Fakir Miskin yang dimaksud adalah orang yang sama sekali tidak memiliki mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunya kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya. Hal itu terjadi mengingat kondisi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka merasa berat apalagi untuk membangun rumah yang layak. Permasalahan yang paling menonjol di Kabupaten dan Kota Kupang adalah kemiskinan, maka Kementerian Sosial mencanangkan salah satu program penanggulangan kemiskinan yakni melalui Kube. Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui Kube tidak terlepas keterlibatan berbagai pihak diantaranya dunia usaha dan masyarakat baik perorangan maupun LSM dalam penanganan kemiskinan sangat diperlukan dari tingkat atas hingga masyarakat lokal sehingga harapan pemerintah untuk menanggulangi kemiskina atau paling tidak mengurangi jumlah warga miskin dapat terwujud.

2. Gambaran Kube di Kabupaten dan Kota Kupang

a. Gambaran Kube di Kabupaten dan Kota Kupang

Pada dasarnya Kube merupakan organisasi yang menekankan pada semangat berusaha dari anggota yang telah ditetapkan melalui keputusan bersama dalam menentukan arah tujuan bersama dalam konteks kesejahteraan.Secara eksplisit tujuan pembentukan Kube adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan sosial keluarga binaan sosial (KBS) melalui UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan UKS (Usaha Kesejahteraan Sosial). Kedua, meningkatkan prinsip-prinsip gotong royong dalam melaksanakan pembangunan serta mengumpulkan dana masyarakat melalui Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS). Ketiga, meningkatkan prinsip berkoperasi dalam meningkatkan UEP kelompok. Keempat, mampu menyisihkan hasil usahanya untuk ditabung guna menghadapi keperluan mendadak atau sebagai tambahan modal. Kelima, terbinanya kegiatan anggota keluarga. Keenam, mengingkatkan kesejahteraan sosial kelompok binaan sosial (KBS) dan terbinanya usaha Jaminan Kesejahteraan Sosial (JKS) berbasis masyarakat.

Mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan (UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin) maka yang menjadi sasaran Kube adalah keluarga fakir miskin (Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin hal 17 Tahun 2010) dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, Kepala Keluarga fakir miskin yang mempunyai pendapatan dibawah garis kemiskinan (tingkat pengeluaran sama dengan 480 kg setara beras untuk perkotaan dan 320 kg untuk perdesaan); Kedua, warga masyarakat yang berdomisili tetap; Ketiga, menyatakan kesediaan bergabung dalam kelompok; Keempat, memiliki potensi dan keterampilan di bidang usaha ekonomi tertentu.

Kebijakan dan strategi dalam pengentasan kemiskinan sangat erat dengan proses pemberdayaan terhadap individu, kelompok, masyarakat miskin. Proses pemberdayaan menurut Jim Ife (1997) didefinisikan sebagai berikut. "Empowerment means providing people with resourses, opportunities, knowledge, and skills to increase their own future, and participate in and effective life of their community". (Pemberdayaan berarti menyediakan manusia dengan sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan masa depan mereka dan berpartisipasi di dalam kehidupan yang efektif pada komunitasnya). Sementara Deopa Narayan (2001) mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut: "empowerment is the expansions of assets and capabilities of poor people so participate in, negotiate with influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives". (Pemberdayaan adalah upaya-upaya untuk memperluas akses dan kemampuan pada kelompok miskin sehingga mau berpartisipasi, dengan menekankan negosiasi, kontrol dan kepercayaan pemegang kekuasaan yang berpengaruh sehingga berdampak terhadap kehidupannya).

Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk 'memampukan' atau 'membuat berdaya' orang miskin yang memiliki beberapa keterbatasan dan ketidakberuntungan di dalam kehidupannya sehingga mereka memiliki kekuatan atau kekuasaan baik secara fisik, material, ekonomi, kelembagaan, kerja sama dan intelektual (Istiana Hermawati, 2011: 105). Pember-

dayaan juga dapat dimaknai sebagai serangkaian proses untuk meningkatkan kemampuan atau kualitas sumber daya manusia komunitas miskin. Kemampuan berdaya menurut Jamasy (2004: 39) mempunyai arti yang sama dengan kemandirian. Dapat disimpulkan, bahwa proses pemberdayaan yang dilaksanakan dalam rangka pengentasan kemiskinan bertujuan untuk membuat orang miskin berdaya dan mandiri atau tidak tergantung pada orang lain. Dengan kemandirian yang dimilikinya tersebut orang miskin dapat menata kehidupannya secara relatif lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidupnya.

Proses pembentukan Kube Fakir Miskin di Kabupaten dan Kota Kupang mengikuti prosedur panduan Kube Kementerian Sosial RI, disesuaikan dengan potensi lokal, peluang pasar daerah sasaran dan kelayakan calon Kelompok Binaan Sosial (KBS). Proses pembentukan Kube meliputi kegiatan identifikasi dan seleksi calon KBS, orientasi dan observasi, penyuluhan sosial, pe-rencanaan program, pembentukan Kube, bimbingan teknis keterampilan dan pengelolaan Kube dan pembinaan usaha kesejahteraan sosial, serta pemberian dana bantuan stimulan. Sebelum dana bantuan stimulan diberikan kepada Kube, dilakukan kegiatan penyuluhan sosial atau sosialisasi program pemberdayaan keluarga fakir miskin melalui Kube. Kegiatan identifikasi dan seleksi dilaksanakan oleh aparat Dinas Sosial Kabupaten dan Kota Kupang bekerjasama dengan aparat kelurahan (Kaur Kesra) dan Lurah, TKSK (Tenaga Kesekahteraan Sosial Kecamatan), Pendamping Kube dan Tokoh Masyarakat. Seleksi calon KBS sebagian besar sesuai kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Sosial, dan sebagian kecil sebesar empat persen bukan fakir miskin namun dapat menjadi penggerak anggota dalam usaha ekonomi produktif secara berkelompok.

Orientasi dan observasi dilaksanakan agar jenis usaha Kube yang dibentuk sesuai potensi anggota, sumber daya lokal dan sesuai budaya lokal sehingga dapat berkembang. Hasil observasi dan orientasi sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan dan penentuan jenis usaha sehingga Kube yang dibentuk sesuai kebutuhan, potensi dan keterampilan yang dimiliki anggota (bottom up). Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Kupang, kepada aparat kelurahan, instansi terkait, sumber daya sosial (tokoh masyarakat, pengurus LSM) untuk mendapatkan dukungan dengan harapan pelaksanaan program tersebut dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik.

Hasil wawancara dengan informan (pengurus dan anggota Kube), kepala kelurahan, tokoh masyarakat, Aparat Dinas Sosial dan instansi terkait serta pemerintah daerah (Bappeda) menunjukkan dukungan terhadap keberadaan Kube. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu faktor pendorong dalam perkembangan Kube. Namun dalam implementasinya perlu peningkatan koordinasi program lintas sektor terkait.

Bimbingan teknis keterampilan dan pengelolaan Kube serta pembinaan usaha kesejahteraan sosial, diberikan setelah Kube terbentuk kemudian pemberian dana bantuan stimulan. Bimbingan usaha ekonomi produktif dan bimbingan usaha kesejahteraan sosial dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pembina fungsional Kube berlangsung selama dua hari (12 jam latihan). Alokasi waktu pelatihan kurang memadai bila dikaitkan dengan bobot materi pelatihan yang harus diserap KBS. Mengingat sebagian besar KBS memiliki keterbatasan pengetahuan dan berpendidikan SD, temuan di lapangan penyerapan materi pemberdayaan yang diberikan kurang optimal, terbukti KBS kurang memahami pengadministrasian kegiatan Kube, Pengelolaan keuangan dan kurang mampu dalam mengakses akses sumber daya lokal untuk pengembangan Kube. Perlu adanya penambahan waktu, materi pelatihan, sarana, prasarana, dana, kurikulum teori dan praktek keterampilan teknis UEP seimbang yang disesuaikan kebutuhan Kube. Pemberian dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP) diberikan melalui transfer ke rekening pengurus Kube setelah membuat proposal UEP dengan bimbingan pendamping Kube yang telah mendapat pelatihan pendampingan Kube dari Kementerian Sosial RI.

Proses pendampingan dilakukan sesuai dengan perannya sebagai pembimbing, pengarah, penghubung, perencana, advokasi/pendampingan untuk kepentingan Kube. Peran pendamping masih perlu ditingkatkan baik secara kuantitas maupun secara kualitas sehingga Kube mampu berkembang optimal. Dukungan dan kerja sama dari masyarakat dan instansi terkait dalam pemberdayaan dan pembentukan Kube) relatif telah terbentuk, dalam arti sebagai fasilitator. Koordinasi program dari berbagai instansi terkait sebagai pembina teknis operasional bagi pengembangan Kube perlu ditingkatkan dalam upaya penanganan kemiskinan di Kabupaten dan Kota Kupang. Pengendalian yang dilaksanakan oleh pendamping dan Dinas Sosial sebagai pembina fungsional dalam pemberdayaan keluarga fakir miskin dan pengendalian Kube telah dilaksanakan cukup baik.

Perkembangan Kube berdasarkan pada ketentuan kategorisasi Kube terbagi kedalam tiga kategori yaitu tumbuh, berkembang dan mandiri. (Depsos, 1997). Kategori Kube dilihat dari aspek organisasi, administrasi, kepemilikan aset, aset sumber, jangkauan pemasaran hasil usaha dan pengembangan usaha. Ada tiga kategori kube yaitu tumbuh, berkembang dan mandiri. Kriteria kube tumbuh yaitu memiliki struktur organisasi, pengadministrasian sederhana bahkan kurang lengkap (terinci), kepemilikan aset dan jangkauan pemasaran terbatas. Kriteria Kube berkembang yaitu administrasi lengkap, berkembangnya organisasi, kepemilikan aset, jenis usaha dan jangkauan pemasaran bertambah serta berkembangnya akses sumber. Kriteria kube mandiri, selain sama dengan kriterian Kube berkembang juga dapat mengakses lembaga keuangan komersial seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan koperasi.

Secara khusus perkembangan kube ditunjukkan oleh: Pertama, berkembangnya kerjasama di antara sesama anggota kube dan antarkube dengan masyarakat sekitarnya. Kedua, mantapnya usaha kube. Ketiga, berkembangnya jenis kegiatan kube. Keempat, meningkatnya pendapatan Kube. Kelima, tumbuh berkembangnya kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dalam bentuk pengumpulan dana iuran kesetiakawanan sosial (IKS) (Departemen Sosial, 1997). Berdasarkan kategorisasi tersebut, delapan kube yang diteliti di Kabupaten dan Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur semua (100 persen) berada pada kategori berkembang sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.

Dari delapan Kube di Provinsi NTT yang diteliti, dua Kube berlokasi di Kabupaten Kupang dan enam Kube berlokasi di Kota Kupang. Dua Kube yang berlokasi di Kabupaten Kupang lebih memfokuskan pada usaha ternak sapi di samping ternak babi dan kambing serta ayam yaitu Kube Jati diri sedangkan Kube Sinar bidang usaha yang ditekuni adalah pertanian. Kondisi di lapangan menunjukkan, bahwa dua Kube tersebut (yang seharusnya beranggotakan 10 orang, dalam kenyataannya memiliki anggota 20 orang). Hal itu tidak sesuai dengan persyaratan yang menyebutkan, bahwa keanggotaan Kube maksimal adalah 10 orang atau 10 KK. Melihat kondisi tersebut baik dinas sosial maupun pendamping Kube menyerahkan sepenuhnya pada kelompok sesuai dengan kearifan lokal masingmasing berdasarkan keputusan bersama. Beberapa jenis usaha yang paling banyak ditekuni Kube di daerah ini adalah bidang peternakan (sapi, babi, kambing dan ayam). Sementara usaha di luar sektor pertanian yang dikembangkan adalah sektor perdagangan dengan jenis kegiatan perkiosan.

Keberadaan Kube di lokasi Kabupaten dan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan Kube masuk dalam kategori berkembang. Kriteria Kube dalam kategori berkembang ditunjukkan dengan kepemilikan buku administrasi cukup lengkap namun dalam pencatatan kegiatan, ada yang cukup lengkap administasi tetapi ada juga yang kurang terinci. Pengurus dan anggota cukup memahami tugasnya. Di antara

Tabel 1
Kategorisasi Kube di Kota dan Kabupaten Kupang Provinsi NTT

No	Nama	Tahun Berdiri	Jenis Usaha	Jumlah Anggota	Lokasi Keterangan	Kategori KUBE
1	Tunas Baru	2008	Peternakan Babi	10 Orang	Kelurahan Manutapen, Kota Kupang	Berkembang
2	Robadeo	2007	Peternakan Sapi	10 Orang	Kelurahan Manutapen, Kota Kupang	Berkembang
3	Usaha Mekar	2008	Perkiosan/ Pertokoan	10 Orang	Kelurahan Lasiana, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang	Berkembang
4	Pelita Kasih	2008	Peternakan babi/ayam,Usaha Tenun dan Sanggar	10 Orang	Kelurahan Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang	Berkembang
5	Sehati	2008	Peternakan Babi, Perkiosan/ Warung	10 Orang	Kelurahan Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang	Berkembang
6	Merpati	2008	Perkiosan	10 Orang	Kelurahan Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang	Berkembang
7	Jati Diri	2009	Peternakan sapi, kambing dan babi	20 Orang	Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang	Berkembang
8	Sinar	2008	Pertanian	20 Orang	Desa Tanah Merah, Kec.Kupang Tengah, Kabupaten Kupang	Berkembang

Sumber: Dokumen Profil Kube NTT (2014)

Kube di Kabupaten dan Kota Kupang memiliki uraian tugas yang jelas dan tertulis dan ada yang tidak memiliki uraian tugas yang jelas namun tidak tertulis. Pemilikan aset secara umum bertambah. Kegiatan yang cukup berkembang di Nusa Tenggara Timur antara lain dengan adanya usaha membuka warung sebagai sarana pengembangan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anggota kube.

Kategori Kube berkembang merupakan langkah awal untuk meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan kube mandiri. Upaya yang dilakukan dengan mempersiapkan segala hal antara lain struktur organisasi, tata kerja pembagian tugas yang jelas secara tertulis, memiliki aturan yang jelas hasil musyawarah bersama (surat kesepakatan bagi hasil, persyaratan dan peraturan bagi pemohon pinjaman). Pengadministrasian kegiatan usaha bersama secara lengkap dan jelas, adanya berbagai catatan kegiatan yang terlihat dalam berbagai buku daftar pengurus dan anggota, buku tamu, buku daftar hadir dan notulen rapat, buku inventaris, buku surat keluar-masuk, buku kas, UEP kelompok, buku kas simpan pinjam, buku kas tabungan pribadi masing-masing

anggota, buku kegiatan kelompok, buku kas IKS (UKS). Perkembangan Kube dari kategori tumbuh menjadi berkembang hingga mandiri memerlukan waktu antara empat sampai dengan enam tahun.

b. Gambaran Kinerja Penyelenggaraan Kube

Keberlanjutan Kube tidak dapat terlepaskan pada peran kinerja organisasi. Kinerja Organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Kinerja individu, kelompok maupun organisasi diperlukan suatu penilaian untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin di capai. Penilaian kinerja sangat penting dilakukan karena dapat di gunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasidalam mencapai misinya. Selain itu kinerja dapat digunakan untuk mengukur tingkat prestasi atau kebijakan individu maupun kelompok individu.

Kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi yaitu kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa disebut sebagai manajemen sedangkan kinerja organisasi adalah bentuk hasil kerja yang didapatkan dalam suatu lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Keban (2004) menyebutkan bahwa kinerja (performance) dalam organisasi didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil "the degree of accomplishment" atau kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan. Kinerja menggambarkan sampai seberapa jauh organisasi tersebut mencapai hasil ketika dibandingkan dengan kinerjanya terdahulu (previous performance) dibandingkan dengan organisasi lain (benchmarking) dan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan (Keban, 2004).

Keban (2004), menyatakan pencapaian hasil kinerja dapat dinilai menurut pelaku yaitu: Pertama, kinerja individu yang menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang telah ditetapkan oleh kelompok atau instansi; Kedua, kinerja Kelompok yaitu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang telah ditetapkan oleh kelompoknya atau instansi; Ketiga, kinerja organisasi yaitu menggambarkan seberapa jauh satu kelompok telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai visi dan misi institusi; Keempat, kinerja program yaitu berkenaan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program yang telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan program.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi adalah seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sesuai program, kebijakan, visi dan misi yang ditetapkan sebelumnya. Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi didalam mencapai

tujuan dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

Kinerja Kube menggambarkan pelaksanaan kegiatan Kube dari aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Aspek sosial terdiri dari indikator yaitu motivasi berkelompok, kerja sama antar anggota Kube dan antar kube, kesetiakawanan sosial dan tanggung jawab sosial, iuran kesetiakawanan sosial (IKS) dan usaha kesejahteraan sosial (UKS), keaktifan anggota kube dalam kegiatan kemasyarakatan, perubahan perilaku positif (tentang pendidikan, kesehatan, gizi makanan dan kebersihan lingkungan). Pengukuran kinerja kube, berdasar pedoman petunjuk pelaksanaan (juklak) Kelompok Usaha Bersama (Kube) direktorat penanggulangan kemiskinan perdesaan Kemensos RI tahun 2014. Pedoman tersebut menjadi dasar terhadap penilaian kinerja terhadap aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan kube

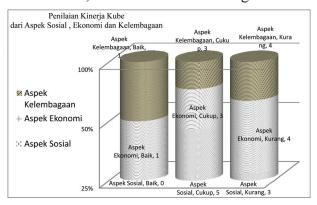
Aspek Ekonomi terdiri dari indikator persepsi terhadap dana stimulan UEP, intensitas usaha dan jumlah jenis usaha, peningkatan kualitas produk, kemampuan mengakses sumber dan potensi (ekonomi), kemampuan merencanakan usaha, melihat peluang pasar, kemampuan pemupukan modal, kemampuan menabung, peningkatan usaha simpan pinjam, kemampuan menjalin kerja sama (kemitraan usaha).

Aspek Kelembagaan terdiri dari indikator kepengurusan dan pembagian tugas, pengadministrasian, proses pengambilan keputusan, pertemuan anggota, pemeliharaan (sarana, prasarana, peralatan), perencanaan usaha, peningkatan SDM, pengelolaan keuangan, kemiteraan dan pengendalian (monitoring, evaluasi dan pelaporan).

Pengukuran kinerja Kube terdiri dari tiga gradasi, yaitu baik, cukup dan kurang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Aspek Sosial terdiri dari tujuh pertanyaan, nilai terendah 7 dan nilai tertinggi 21. Kinerja Kube dari aspek sosial dinilai baik apabila mendapat skor antara (17–21), cukup apabila mendapat skor antara (12-16), kurang apabila mendapat skor (7-11). Aspek Ekonomi terdiri dari 10 pertanyaan, nilai

terendah 10 dan tertinggi 30. Kinerja Kube dari aspek ekonomi dinilai baik apabila mendapatkan skor antara 24-30, cukup apabila mendapat skor antara 17-23 dan kurang apabila mendapat skor 10 antara 10-16. Aspek Kelembagaan terdiri dari 14 item nilai terendah 14 dan nilai tertinggi 42, kinerja Kube dari aspek kelembagaan dinilai baik apabila mendapat skor antara 33-42, cukup mendapat skor antara 23-32 dan kurang mendapat skor 14-22. Gambaran kinerja Kube secara rinci dapat dilihat pada grafik 3 berikut.

Grafik 3 Penilaian Kinerja Kube Berdasarkan Aspek Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan



Sumber: Dokumen Profil Kube NTT (2014)

Grafik 3 di muka menggambarkan kinerja delapan Kube yang diteliti dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Dari Aspek sosial, menunjukkan bahwa sebanyak lima Kube (62,5 persen) kinerjanya dalam kategori cukup, tiga Kube (37,5 persen) dalam kategori kurang. Dari data ini dapat disimpulkan, bahwa secara umum kinerja Kube dilihat dari aspek sosial dalam kategori cukup baik. Namun demikian, tidak ditemukan Kube dalam kategori baik. Dari hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa kinerja Kube dilihat dari aspek sosial dalam kategori cukup dapat dilihat dari anggota memiliki motivasi kelompok, saling memiliki ikatan emosional dalam menjalin hubungan satu sama lain. Hal tersebut ditunjukkan mereka merasa senang menghadiri setiap pertemuan yang diadakan, terbukti pertemuan rutin yang dilakukan secara berkala selalu dihadiri lebih dari 79 persen anggota.

Hasil wawancara terhadap salah satu anggota Kube, mereka mengatakan, "Saya selalu hadir dalam pertemuan rapat anggota Kube, kecuali ada keperluan mendesak, karena kegiatan itu dapat memberi manfaat untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman dan dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi baik permasalahan pribadi maupun permasalahan kube." Sebagian besar responden beranggapan dengan adanya Kube, mereka merasa memiliki kekuatan atau keberanian dalam menghadapi masalah dan beranggapan tidak sendirian dalam menghadapi kehidupan.

Sebagai bentuk kepedulian dan kesetiakawanan sosial terhadap sesama anggota, dilaksanakan iuran kesetiakawanan sosial (IKS) setiap bulan sesuai kesepakatan di masing-masing Kube. Temuan di lapangan menunjukkan, bahwa setiap tahun kube memberi dana IKS, dana kesejahteraan sosial, kepada anggota kube yang terkena musibah. Walaupun nilainya relatif kecil tetapi cukup berarti, karena merasa diperhatikan dan mendapat bantuan pemecahan masalah yang dihadapi serta dapat mengurangi beban keluarga. Di samping untuk kepentingan anggota, sebagian dana dipergunakan untuk membantu uang transpor pendamping, apabila hadir pada pertemuan kelompok. Sebagian besar responden menyadari arti penting pendamping untuk kemajuan kube.

Kinerja Kube dilihat dari Aspek Ekonomi menunjukkan, bahwa sebanyak satu Kube (12,5 persen) kinerjanya dalam kategori baik, tiga Kube (37,5 persen) kinerjanya dalam kategori cukup dan sebanyak empat kube (50 persen) dalam kinerjanya dalam kategori kurang. Dari data ini dapat disimpulkan, bahwa secara umum kinerja kube dilihat dari aspek ekonomi dalam kategori kurang. Dari hasil pengumpulan data di lapangan, kube dalam kategori kurang, diketahui persepsi para anggota terhadap bantuan stimulan. Anggota kurang mendukung bantuan stimulan untuk pengembangan usaha. Stimulan yang diberikan dianggap bantuan hibah yang

tidak perlu mengembalikan sehingga kurang adanya tanggung jawab pengembangan usaha untuk pengguliran kepada masyarakat sekitar. Kube tersebut hanya menggeluti satu jenis usaha, belum ada upaya untuk melakukan diversifikasi usaha, kurang kreatif dan kurang memahami dan mengakses sumber untuk pengembangan usaha. Kube kurang mampu mengakses sumber dan mengembangkan jaringan usaha.

Kube pada kinerja aspek ekonomi kategori cukup ditunjukkan adanya persepsi positif terhadap bantuan stimulan yang harus dikembangkan bukan dibagi habis oleh anggota, adanya keberlanjutan usaha, diversifikasi usaha termasuk usaha simpan pinjam dan upaya peningkatan kualitas produk, cukup dapat melihat peluang pasar walaupun belum maksimal hasil usahanya. Kube sudah mulai membangun kerjasama dalam pemasaran, sebagaimana adanya kerjasama antara kube dalam melayani pelanggan. Jangkauan pemasaran sudah mulai diluar lingkungan walaupun belum optimal. Kube mampu mengaksesdana usaha dari luar terutama untuk usaha simpan pinjam. Usaha simpan pinjam, secara ekonomi dapat menjadikan peningkatan modal usaha. Temuan di lapangan, kube yang kinerjanya baik, cukup baik maupun kurang ada dalam kategori berkembang.

Kube sebagai kelompok usaha yang dikelola secara bersama oleh KBS dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi indikator sebagai berikut. Pertama, secara umum keberhasilan kube tercermin pada meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat disekitarnya yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia (pangan, sandang dan papan); Kedua, meningkatnya dinamika sosial; Ketiga, meningkatnya kemampuan dan keterampilan pemecahan masalah.

Hasil pengamatan di lapangan, semua kube dalam kategori berkembang menunjukkan adanya keberlanjutan usaha, adanya upaya peningkatan kualitas produk, kemampuan yang cukup dapat melihat peluang pasar walaupun belum maksimal hasil usahanya, telah mulai ter-

lihat membangun kerja sama dalam pemasaran, sebagaimana adanya kerja sama antara kube dalam melayani pelanggan. Jangkauan pemasaran mulai di luar lingkungan setempat meskipun belum optimal. Untuk meningkatkan usahanya kube mengakses dana usaha dari luar terutama untuk usaha simpan pinjam, dengan adanya simpan pinjam, secara ekonomi dapat menjadikan peningkatan modal usaha kube meskipun sedikit jumlahnya, juga dapat meningkatkan jumlah usaha ekonomi masyarakat, sehingga dapat merasakan manfaat kube.

Dari aspek kelembagaan menunjukkan, bahwa lebih dari separuh Kube kinerjanya pada kategori kurang yaitu sebanyak empat Kube (50 persen), sebanyak tiga Kube (37,5 persen) kinerjanya pada kategori cukup dan selebihnya yaitu sebanyak satu Kube (12,5 persen) kinerjanya pada kategori baik. Dari data ini dapat disimpulkan, bahwa secara umum kinerja kube dilihat dari aspek kelembagaan dalam kategori kurang baik. Kinerja kube pada kategori kurang terlihat dari indikator lemahnya dalam pengadministrasian (buku kurang lengkap dan pencatatan kurang rinci), uraian tugas kurang jelas dan kurang dipahami oleh pengurus, dalam pengendalian kube kurang dilakukan evaluasi kegiatan dan laporan kurang lengkap, kemitraan terbatas, tidak menginventarisasi sumber atau kurang bisa mengakses sumber untuk perkembangan kube, pengelolaan aset kurang memadai terbukti ada aset yang mengalami kerusakan tidak diperbaiki dengan yang baik. Kube pada kategori cukup, terlihat dari indikator: memiliki buku administrasi cukup lengkap dan pencatatan cukup terinci, pengurus dan anggota cukup memahami tugas yang dibebankan, dapat menjalin kemitraan dengan berbagai sumber untuk perkembangan kube (tetapi perlu ditingkatkan), sarana dan prasarana yang dimiliki kube cukup memadai dan dapat menunjang kegiatan usaha serta pengelolaan aset dan keuangan cukup memadai sehingga aset yang dimiliki tidak berkurang. Kube pada kategori baik, terlihat dari sarana administrasi lengkap dan pencatatan terinci, jalinan kemitraan

berkembang lebih luas dan pengelolaan aset keuangan relatif lebih baik dibandingkan dengan kube pada kategori cukup.

Sebagian besar kinerja Kube dilihat dari kelembagaan yakni 50 persen masuk dalam kategori kurang, terbukti kepemilikan buku kurang lengkap dan pencatatan kurang rinci, hanya mengungkap nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan namun tidak mengungkap potensi yang dapat dikembangkan, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki. Buku agenda kelompok pertemuan tidak mengungkap topik dan materi hasil pertemuan sebagai dokumen atau bahan evaluasi dalam upaya pengembangan Kube. Kegiatan Kube tidak melalui perencanaan. Bendahara hanya memiliki catatan buku kas sederhana tanpa menyertakan bukti pengeluaran. Pengurus kurang memiliki inisiatif, kreatif, dan inovatif dalam pengembangan usaha. Kube masih memiliki keterbatasan dalam kemiteraan dan mengakses sumber-sumber untuk kemajuan Kube. Evaluasi sebagai pengendalian Kube kurang dilakukan dan dalam penyusunan laporan masih sangat tergantung pada peran pendamping.

Kelembagaan kube pada kategori cukup, terlihat kube memiliki pembagian tugas secara tidak tertulis, namun tetapi pengurus dan anggota cukup memahami tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Ketua kube mampu menggerakkan dan mendayagunakan potensi anggota kelompok. Ketua kube dapat mengidentifikasi, mengakomodasi, dan menggerakan serta memanfaatkan segenap potensi atau kemampuan dan sumber-sumber yang dimiliki. Dalam menggerakan anggota, mengacu pada aturan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing anggota. Pengadministrasian kegiatan dan keuangan cukup tertib dan terinci disertai bukti pengeluaran, terbukti kube memiliki kelengkapan buku catatan yang dibutuhkan. Kube mampu menjalin kemitraan dengan berbagai sumber dalam upaya diversifikasi usaha untuk perkembangan kube meskipun masih perlu ditingkatkan. Kube telah memiliki prasarana dan sarana yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan usaha. Pengelolaan aset dan keuangan cukup memadai terbukti aset yang dimiliki tidak berkurang tetapi semakin berkembang.

Dari data di lapangan hanya ditemukan satu kube dilihat dari aspek kelembagaan dalam kategori baik yakni Kube Jati Diri terlihat dari adanya pembagian kerja yang jelas, rinci secara tertulis yang dipahami oleh pengurus dan anggota. Ketua sebagai pemimpin kelompok bertugas mengkoordinir pengelolaan, mengatur pelaksanaan usaha. Sekretaris, bertugas melaksanakan kegiatan administrasi pengelolaan kube dibantu oleh pengurus yang lain. Demikian juga tugas bendahara yakni menjalankan pengelolaan keuangan baik yang masuk maupun keluar sepengetahuan ketua. Memiliki kelengkapan buku administrasi dan pencatatan terinci, antara lain: buku daftar pengurus dan anggota kube, buku tamu, buku daftar hadir rapat pengurus, buku administrasi surat masuk-keluar, buku daftar inventaris, buku kas usaha kelompok, buku kas IKS, buku kas simpan pinjam, buku kegiatan kelompok, buku rencana kerja, buku kas tabungan pribadi masing-masing anggota. Selanjutnya anggota bertugas sebagai pemasaran, mendokumentasikan kegiatan, dan membantu pengurus dalam menjalankan, mengatur dan menjaga peralatan inventaris yang dimiliki.

Kesuksesan kube dapat dilihat dari: Pertama, usaha ekonomi berdasarkan rencana usaha dan anggaran belanja yang disepakati bersama; Kedua, usaha ekonomi berorientasi pasar; ketiga, menggunakan modal usaha sesuai dengan kebutuhan usaha; Keempat, menggunakan bahan baku yang mudah diperoleh dari lingkungan setempat; Kelima, melakukan usaha sesuai dengan keterampilan yang dimiliki; Keenam, sistem pengelolaan usaha ekonomi dapat dilaksanakan semua anggota; Ketujuh, ada komitmen dan kerjasama yang kuat dari setiap anggota untuk berhasil; Kedelapan, harga yang ditawarkan menguntungkan dan bersaing di pasar. Kesembilan, adanya kebersamaan dalam menghadapi berbagai hambatan usaha.

1. Manfaat Kube bagi Anggota

Penggalian secara kualitatif terhadap dampak Kube bagi anggota dapat dilihat dari manfaat kube bagi anggota dan masyarakat di sekitarnya. Dari hasil wawancara diperoleh informasi, bahwa manfaat Kube bagi anggota antara lain: Pertama, sebagai wadah aktualisasi diri terhadap lembaga usaha bersama secara kolektif mengangkat derajat sesama anggota; Kedua, kube sebagai media pembelajaran secara ekonomi baik secara individu maupun berkelompok; Ketiga, Kube memberikan pemahaman bagi setiap individu mengenai interaksi sosial sesama anggota Kube itu sendiri; Keempat, sebagai ajang untuk berorganisasi antara satu dengan anggota yang lain dalam satu organisasi kube; Kelima, memahami kerangka kerja administratif pengelolaan dan manajemen kube; Keenam, membangun kesetiakawanan dan solidaritas antaranggota kube

2. Manfaat Kube bagi Masyarakat

Manfaat kube bagi masyarakat sekitar meskipun tidak dapat dilihat secara langsung tetapi keberadaan kube di lingkungan masyarakat tersebut memiliki arti penting yaitu sebagai sebuah pranata yang secara sosial dan ekonomi mengupayakan sebuah kebersamaan, terbingkai dalam kolektivitas kerja sosial demi meningkatkan kesejahteraan secara berkelompok melalui kube. Beberapa manfaat kube bagi masyarakat meliputi: Pertama, terdapatnya manfaat sosial kelembagaan secara kelompok bagi Fakir Miskin yang memberdayakan Kelompok fakir miskin tersebut. Kedua, semakin berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat khususnya bagi kelompok masyarakat yang tergolong kurang mampu; Ketiga, kube dalam masyarakat menjadi penguat jaringan kerja bagi kelompok fakir miskin; Keempat, kube sebagai bagian dari area publik bagi fakir miskin dalam mengakses sumber sumber potensi kesejahteraan sosial; Kelima, kube sebagai ornamen motivator bagi kelompok fakir miskin untuk membentuk kekuatan ekonomi dan sosial demi kesejahteraan masyarakat secara umum karena kaum fakir miskin merupakan bagian dari sebuah komunitas yang perlu

diberdayakan; Keenam, kube dapat diharapkan menjadi bagian dari pranata sosial masyarakat untuk dijadikan acuan kelompok bersama secara ekonomi dalam menentukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kube

Faktor yang menjadi pendukung akan keberhasilan usaha kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui program Kube, yakni semangat anggota kelompok yang cukup tinggi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui program Kube, seperti keaktifan anggota Kube dalam mengadakan kegiatan rutin, kedisiplinan anggota kube dalam pengelolaan administrasi dan keuangan serta penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan; Kuatnya rasa ikatan persaudaraan di antara anggota kube (tercermin dari sikap saling membantu, tolongmenolong, gotong royong, dan kerja sama yang baik). Semangat kerja sama dan gotong royong tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada kelompok, yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kelompok, seperti arisan dan simpan pinjam; Adanya pendampingan sosial yang selalu berusaha menjalin relasi sosial diantara pendamping anggota kube dan masyarakat dalam memecahkan masalah, memperkuat akses dan mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial; Masih tingginya minat masyarakat miskin untuk dapat berkembang bersama dalam program Kube; Interaksi sosial yang tinggi atas dasar kesamaan visi dan pandangan untuk mengubah kehidupan yang lebih baik; Terdapatnya sistem atau jaringan kerja kelembagaan serta keberfungsian pendamping dalam mengarahkan dan membimbing kube sehingga kinerja kube meningkat di masa mendatang; Adanya Perda No 14 Tahun 2011 tentang keterlibatan semua sektor dalam penanganan kemiskinan tetapi dalam implementasinya perlu peningkatan koordinasi program lintas sektor terkait.

Faktor yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha kesejahteraan sosial program pengentasan kemiskinan melalui Kube adalah sebagai berikut. Pertama, rendahnya tingkat pendidikan anggota kelompok, yang menyebabkan kemampuan untuk pengelolaan kube relatif kurang, mengakibatkan usaha yang dilakukannya kurang bisa berkembang secara optimal. Kedua, terbatasnya kemampuan diversifikasi usaha, kelompok terbiasa dalam kondisi sebelumnya dan tidak berani berspekulasi untuk membuka usaha yang baru. Ketiga, rendahnya mobilitas yang menyebabkan sempitnya pemasaran hasil usaha, kondisi ini merupakan penyebab kecilnya daya serap dana bantuan secara maksimal. Dana bantuan yang diperoleh cenderung dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif dibanding usaha produktif. Keempat. kurangnya keterbukaan antar pengurus dan anggota kube dalam mengelola usaha bersama yang pada akhirnya mendorong terjadinya rendahnya partisipasi dan semangat kebersamaan di antara para anggota kube dan kurang kondusifnya iklim kerja di kelompok. Kelima, kendala budaya berupa adanya rasa kurang saling percaya di antara para anggota kube yang berasal dari marga yang berbeda. Apabila anggota kube terdiri dari berbagai etnis dan beragam karakter, budaya dan istiadat yang berbeda, berimplikasi pada perbedaan strategi dalam mengembangkan usaha Kube. Ketujuh, kondisi geografis yang kurang mendukung sehingga komunikasi menjadi kurang lancar antara kube dengan pembina dan atau pendamping. Kedelapan, proses pembentukan kube yang relatif lemah dalam asessmen, sehingga kegiatan kube kadang tidak berdasarkan kebutuhan riil anggota kube dan tidak sepenuhnya diawali dengan pemberian kegiatan bimbingan penyuluhan sosial, pelatihan manajemen usaha, UEP, IKS dan UKS. Muatan kegiatan lebih banyak bermaterikan tertib administrasi organisasi. Kesembilan, kelemahan anggota kube dalam merencanakan program kegiatan usaha, manajemen organisasi, dan rendahnya kemampuan mendistribusikan hasil produksi kube ke berbagai institusi ekonomi sebagai akibat dari lemahnya kemampuan

menjalin relasi kerja (networking). Kesepuluh, sistem kerja kelompok yang belum tertata dengan baik ditingkat internal dan anggota belum secara penuh dilibatkan dalam setiap kegiatan. Kesebelas, menejemen pengelolaan dan sistem pengadministrasian kube yang relatif masih sederhana, meskipun di beberapa kube telah ada sistem yang relatif baik.

D. Penutup

Hasil penelitian Kube di lokasi Kabupten dan Kota Kupang dapat disimpulkan sebagai konklusi penelitian. Ditinjau dari kategori Kube, dari delapan Kube yang diteliti di lokasi penelitian, mayoritas Kube (100 persen) termasuk dalam kategori berkembang. Kinerja dilihat dari aspek sosial, menunjukkan terdapat lima Kube (62,5 persen) memiliki kinerja cukup baik dan terdapat tiga Kube (37,5 persen) memiliki kinerja kurang. Kinerja Kube ditinjau dari aspek ekonomi menunjukkan terdapat empat Kube (37,5 persen) memiliki kinerja kurang, tiga Kube (37,5 persen) memiliki kinerja cukup, dan satu Kube (12,5 persen) memiliki kinerja baik. Dilihat dari aspek kelembagaan menunjukkan terdapat empat Kube (37,5 persen) memiliki kinerja kurang baik, tiga Kube (37,5 persen) memiliki kinerja cukup, dan satu Kube (12,5 persen) memiliki kinerja dalam kategori baik. Ditinjau dari ketiga aspek kinerja Kube yang diteliti, ditemukan kelemahan pada aspek kelembagaan dan ekonomi. Hal ini tampak dari hasil evaluasi pada kedua aspek ini berada dalam kategori kurang.Pada aspek sosial masuk pada kategori cukup.

Dilihat dari faktor yang mempengaruhi kinerja Kube dapat dilihat beberapa faktor pendukung dan penghambat antara lain semangat anggota kelompok yang tinggi, kuatnya rasa kebersamaan, adanya pendamping yang kompeten, adanya dukungan masyarakat, adanya dukungan SDA potensi lokal dan nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh sebagian besar anggota Kube. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan Kube diantaranya adalah rendahnya kualitas SDM sasaran (pendidikan rendah dan keterampilan dalam mengelola usaha terbatas),

kendala geografis dan nilai sosial-budaya yang kurang kondusif, lemah dalam membangun *networking*.

Rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Dayasos Ditjen Dayasos dan Gulkin Kementerian Sosial mengenai kinerja kube khususnya dari aspek ekonomi dan kelembagaan terbukti kurang, sementara aspek sosial menunjukkan hasil cukup. Ke depan agar kinerja kube menjadi lebih baik, dalam penyusunan program pemberdayaan keluarga miskin, di samping menekankan pada pengembangan aspek sosial juga menekankan pada pengembangan aspek ekonomi dan kelembagaan dalam porsi yang seimbang. Perlu adanya sinergi pada aspek ekonomi dan kelembagaanya yang terintegrasi dengan aspek sosial. Dari sisi pendamping kube juga diharapkan agar meningkatkan kinerja advokasi sosial kelembagaan dalam pengelolaan kube dengan menekankan pada dimensi ekonomi dan kelembagaan dengan melakukan penyadaran pada elemen anggota. Bagi Dinas Sosial setempat, perlunya peningkatan koordinasi (program) dengan instansi terkait, baik dalam proses pembentukan, pelaksanaan maupun dalam pengembangan kube. Perlu adanya pendampingan dan peningkatan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait dalam rangka peningkatkan kualitas dan kuantitas produk untuk mencapai hasil usaha dan perkembangan kube yang optimal, perlu peningkatan kelengkapan sarana/ prasarana, pengadaan insentif yang memadai bagi pendamping dan waktu pendampingan yang intensif dalam rangka menunjang perkembangan Kube. Perlu peningkatan kualitas KBS agar dapat memiliki kemampuan pengelolaan usaha (menejerial) kube, kemampuan mengakses sumber daya sosial ekonomi, kemampuan mengakses peluang pasar, dan kemampuan menjalin kemiteraan usaha (networking).

Pustaka Acuan

- Biro Pusat Statistik, 2005-2014. *Statistik Indonesia* dan *Susenas*. Jakarta: BPS RI
- Departemen Sosial Republik Indonesia, 1996. *Meningkat-kan Kesejahteraan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama*, Jakarta: Departemen Sosial.

- ———, 1997.Peranan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama, Jakarta: Departemen Sosial.
- ———, 2003. Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Depsos RI
- _______, 2003. Profil KUBE Berkembang, Jakarta: Departemen Sosial.
- ————, 2003. *Profil Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: Pusdatin Kesos Depsos RI
- ————, 2003. Mewujudkan Kemandirian Keluarga Melalui KUBE KMM, Jakarta: Depsos RI.
- ———, 2003. Panduan Pengelolaan Kelompok Usaha Bersama Keluarga Muda Mandiri, Jakarta: Depsos RI
- ———, 2003. Petunjuk Teknis Penanggulangan Fakir Miskin Melalui Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Depsos RI
- ———, 2004. Panduan Umum Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif Melalui KUBE dan LKM, Jakarta: Depsos RI
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2010. *Pedoman Kelompok Usaha Bersama*. Jakarta: Dirjen Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan.
- ————, 2014. Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama. Jakarta: Ditjen Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan.
- Heru Nugroho. 2000. *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ife, Jim. 2002. Community development. Community based alternatives in an ag of globalizational second edition. South Melbourne: Addison Wesley Longman Australia Pty Ltd.
- Issac, S, Michael, W.D. 1981. *Handbook in Research and Evaluation: For Education and the Behavioural Sciences (2nd edittion)*. San Diego California: Ed III Publishers.
- Istiana Hermawati, 2001. Program Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE (Suatu Analisis Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah di Bidang Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fisip UI, tidak diterbitkan.
- Istiana Hermawati dkk. 2005. *Efektifitas Program Pengentasan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: B2P3KS
- Khatib Pahlawan Kayo, 2009, KUBE Sebagai Wahana Intervensi Komunitas dalam Praktek Pekerjaan Sosial, Padang:B2P2KS
- Narayan, Deopa. 2002. Empowment and Poverty Reduction a Source Book. Washington, DC: The World bank
- Owin Jamasay. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan dan Pe-nanggulangan Kemiskinan*. Bandung: Blantika
- Sutrisno Hadi, 1991. *Metodologi Research Jilid 3*, Yogyakarta: Andi Offset

- Tjahya Supriyatna, 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: PT Humaniora Utama Press
- Weiss, CH (1972). Evaluation Research Method for Assesing Program Effectiveness. Engle word cliffs: Prentice. Hall.Inc.
- Yeremias T. Keban. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta. Gaya Media

Peraturan Perundangan

Inpres No 3/ 1996 tentang *Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan*

- Inpres RI no.5/ 1993 tentang *Program Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan*
- Perpres No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Pemerintah No 42/ 1981 tentang *Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin*
- *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun* 1945 (pasal 27 dan 34)
- Undang-undang No 22/ 1999 tentang *Pemerintahan Daerah* (Sejak Januari 2001 terkenal dengan UU tentang *Otonomi Daerah*)
- Undang-Undang no 25 tahun 2000 tentang *Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004*.
- Undang-undang No 11/ 2009 tentang Kesejahteraan Sosial